

NOTULEN

RAPAT KERJA BAPEMPERDA BERSAMA DENGAN BIRO HUKUM
SETDAPROVSU, BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAPROVSU,
BIRO PEREKONOMIAN SETDAPROVSU, BIRO ORGANISASI
SETDAPROVSU, BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU, BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVSU, BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVSU,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PROVSU, BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVSU, BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVSU,
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVSU, DINAS
KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVSU, DINAS
KESEHATAN PROVSU, DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA, DINAS PERHUBUNGAN PROVSU, DINAS
PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVSU, DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVSU, DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVSU, DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVSU, DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVSU, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVSU, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVSU, DINAS KEPEMUDAAN
DAN KEOLAHRAGAAN PROVSU, DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVSU, DINAS KETENAGAKERJAAN
PROVSU, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVSU TERKAIT
PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2029.

TANGGAL, 16 Juni 2025

A. DASAR.

SURAT KETUA DPRD SUMATERA UTARA NO : 400/2619/Sekr.DPRD/VI/2025
TANGGAL : 05 Juni 2025 PERIHAL PENUGASAN INSTANSI TERKAIT

B. PELAKSANAAN.

HARI : SENIN
TANGGAL : 16 JUNI 2025
PUKUL : 14.00 WIB
TEMPAT : RUANG AULA RAPAT LANTAI I KANTOR DPRD SUMUT
AGENDA : TERKAIT PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2029.

C. PESERTA RAPAT

- BIRO HUKUM SETDAPROVSU
- BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAPROVSU
- BIRO PEREKONOMIAN SETDAPROVSU
- BIRO ORGANISASI SETDAPROVSU
- BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU
- BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVSU
- BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVSU
- BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVSU
- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVSU
- BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVSU
- BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVSU
- DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVSU
- DINAS KESEHATAN PROVSU
- DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
- DINAS PERHUBUNGAN PROVSU, DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVSU
- DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVSU
- DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVSU
- DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVSU
- DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVSU
- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVSU
- DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVSU
- DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROVSU
- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVSU
- DINAS KETENAGAKERJAAN PROVSU
- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVSU

D. JALANNYA RAPAT

1. RAPAT DIBUKA OLEH KETUA BAPEMPERDA DPRD SUMATERA UTARA TEPAT PADA PUKUL 14.00 WIB.
2. PERKENALAN DAN PENGANTAR OLEH KETUA BAPEMPERDA DPRD SUMATERA UTARA BAPAK DHARMA PUTRA RANGKUTI.
3. SELANJUTNYAWAKIL KETUA BAPEMPERDA BAPAK DHARMA PUTRA RANGKUTI MEMULAI MEMIMPIN RAPAT.
4. PENJELASAN PESERTA RAPAT DAN DINAS TERKAIT :

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) ERHADAP
RANPERDA RPJMD 2025-2029**

DOKUMEN INI DISUSUN UNTUK MEMBERIKAN DUKUNGAN KEPADA RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PERIODE 2025-2029, DENGAN FOKUS PADA SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG. DOKUMEN INI DISAMPAIKAN DALAM RAPAT BAPEMPERDA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA PADA 16 JUNI 2025.

VISI DAN MISI PEMERINTAH

VISI PRESIDEN 2025-2029

VISI NASIONAL YANG DIUSUNG DALAM RPJMD INI MENGARAH PADA "INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045", YANG MENCAKUP PENGUATAN SISTEM PERTAHANAN NEGARA DAN MENDORONG KEMANDIRIAN DALAM BERBAGAI SEKTOR SEPERTI PANGAN, ENERGI, AIR, EKONOMI DIGITAL, EKONOMI HIJAU, DAN EKONOMI BIRU.

MISI PRESIDEN 2025-2029 BERFOKUS PADA:

- PENGKATAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG LAPANGAN KERJA YANG BERKUALITAS.
- PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF DAN EKONOMI BERBASIS KEWIRASAHAAN.
- PEMBANGUNAN AGROMARITIM DAN KOPERASI SEBAGAI PENDUKUNG PEREKONOMIAN RAKYAT.

VISI DAN MISI GUBERNUR SUMATERA UTARA 2025-2029

VISI GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA ADALAH "KOLABORASI SUMUT BERKAH MENUJU SUMATERA UTARA YANG UNGGUL, MAJU, DAN BERKELANJUTAN", DENGAN MISI UTAMA MENCAKUP:

1. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).
2. MENJAGA STABILITAS EKONOMI DAERAH.
3. MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN.

4. MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS YANG ESTETIK DAN RAMAH LINGKUNGAN.
5. MEMPERKUAT KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT YANG TANGGUH.

DUKUNGAN TERHADAP SASARAN MAKRO PEMBANGUNAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA MENGARAHKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG SASARAN MAKRO BERIKUT:

1. PENINGKATAN KEMANTAPAN JALAN DAN JEMBATAN MENINGKATKAN KONDISI JALAN DAN JEMBATAN DI KAWASAN PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI. HAL INI MENCAKUP PENGUATAN KONEKTIVITAS ANTAR DAERAH PENTING, SEPERTI KAWASAN PERTUMBUHAN DAN KOMODITAS UNGGULAN.
2. PERBAIKAN WADUK DAN SISTEM IRIGASI FOKUS PADA PERBAIKAN WADUK DAN SISTEM IRIGASI UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA PANGAN, YANG MENJADI PRIORITAS UTAMA DALAM PENGEMBANGAN DAERAH INI.
3. PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENGENDALI BANJIR INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI UNTUK MENGENDALIKAN BANJIR DAN DAYA RUSAK AIR MENJADI PERHATIAN DALAM MENCAPAI KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN SERTA MELINDUNGI DAERAH-DAERAH RAWAN BENCANA.
4. PENINGKATAN KUALITAS JASA KONSTRUKSI MENGEMBANGKAN KUALITAS DAN KUANTITAS EKOSISTEM JASA KONSTRUKSI MELALUI PELATIHAN DAN PENINGKATAN KETERAMPILAN TENAGA KERJA YANG TERLIBAT DALAM SEKTOR INI.
5. PENATAAN RUANG DAN KEMUDAHAN INVESTASI MAKSIMALKAN FUNGSI PENATAAN RUANG UNTUK MENINGKATKAN KEMUDAHAN DALAM INVESTASI DAN MEMPERBAIKI KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG LEBIH BAIK.

PENCAPAIAN PROGRAM PRIORITAS

BEBERAPA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (PP) DAN PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (PHTC) YANG DIJABARKAN DALAM DOKUMEN INI MELIPUTI:

1. INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN TERINTEGRASI PENINGKATAN PANJANG JALAN DAN JEMBATAN DI KAWASAN PRIORITAS DENGAN TARGET KEMANTAPAN JALAN SEBESAR 87% DAN KONDISI JEMBATAN 86% DALAM KONDISI BAIK PADA AKHIR PERIODE RPJMD. PEMBANGUNAN DAN REKONSTRUKSI JALAN SEPANJANG 90-120 KM PER TAHUN SERTA PEMBANGUNAN 36 JEMBATAN BARU DI 33 KABUPATEN/KOTA.
2. PERBAIKAN WADUK DAN SISTEM IRIGASI PENANGANAN WADUK DAN SALURAN PADA DAERAH IRIGASI UNTUK MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN, SERTA PENINGKATAN SISTEM IRIGASI DENGAN TARGET PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN SISTEM JARINGAN IRIGASI DI DAERAH IRIGASI PERMUKAAN DAN RAWA.
3. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS, ESTETIK, DAN IKONIK FOKUS PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG TIDAK HANYA BERKUALITAS NAMUN JUGA MEMILIKI NILAI TAMBAH DAN RAMAH LINGKUNGAN, TERMASUK PENGENDALIAN BANJIR DI KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PENATAAN SUNGAI.
4. INFRASTRUKTUR UNTUK DAERAH TERPENCIL PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH TERPENCIL DAN PEDESAAN, SEPERTI PENYEDIAAN AIR MINUM YANG LAYAK MELALUI PROGRAM SPAM IKK DAN PENATAAN KAWASAN KUMUH DI PERKOTAAN YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR BERSIH.
5. DUKUNGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DAN INDUSTRI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG DI KAWASAN INDUSTRI DAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK), DENGAN FOKUS PADA PENGELOLAAN AIR LIMBAH (IPAL) DI KAWASAN KEK SEI MANGKE (BATU BARA DAN SIMALUNGUN), SERTA PENGADAAN LAHAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERKAIT.

RENCANA ANGGARAN DAN PAGU INDIKATIF

DOKUMEN INI JUGA MENCAKUP RINCIAN ANGGARAN YANG DIBUTUHKAN UNTUK TIAP SUB-URUSAN, DI ANTARANYA:

- URUSAN KEBINAMARGAAN (JALAN DAN JEMBATAN) DENGAN TOTAL ANGGARAN 1.178,349 JUTA RUPIAH.
- URUSAN SUMBER DAYA AIR DENGAN TOTAL ANGGARAN 248,944 JUTA RUPIAH.
- URUSAN PENATAAN RUANG DENGAN ANGGARAN 3,602 JUTA RUPIAH.
- URUSAN BINA KONSTRUKSI DENGAN ANGGARAN 1,858 JUTA RUPIAH.
- URUSAN KECIPTAKARYAAN DENGAN ANGGARAN 136,097 JUTA RUPIAH.

DOKUMEN INI MEMBERIKAN GAMBARAN JELAS MENGENAI RENCANA PEMBANGUNAN SEKTOR INFRASTRUKTUR YANG SANGAT PENTING BAGI KEMAJUAN PROVINSI SUMATERA UTARA. DENGAN FOKUS PADA PENGEMBANGAN JALAN, JEMBATAN, WADUK, SISTEM IRIGASI, PENGELOLAAN AIR, DAN PENATAAN RUANG, RPJMD INI BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT, MEMPERKUAT EKONOMI DAERAH, DAN MEMAJUKAN PROVINSI SUMATERA UTARA SECARA KESELURUHAN. PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT AKAN DIJALANKAN DENGAN DUKUNGAN ANGGARAN YANG TEPAT SASARAN SERTA KOLABORASI ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA UNTUK MEMASTIKAN TERCAPAINYA TUJUAN-TUJUAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2029

1. BAHAN PAPARAN YANG DIUNGGAH INI MENYAJIKAN **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)** DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (DLHK) PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PERIODE **2025-2029**. RENCANA STRATEGIS INI DISUSUN UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA YANG

BERKELANJUTAN DENGAN FOKUS PADA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM (SDA). DOKUMEN INI DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA PEMBAHASAN RANPERDA RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA YANG BERTUJUAN UNTUK MEMASTIKAN KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN MEMPERHATIKAN ASPEK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (DLHK)

DLHK PROVINSI SUMATERA UTARA MEMILIKI TUGAS POKOK YANG SANGAT PENTING DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SDA, SERTA MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN. TUGAS POKOK TERSEBUT MELIPUTI:

1. INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN: MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN TERKAIT DENGAN PENATAAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN, BAIK UNTUK HUTAN LINDUNG MAUPUN HUTAN PRODUKSI.
2. REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN: MELAKUKAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA SERTA PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL YANG BERTUJUAN UNTUK MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN.
3. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM: PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS), KONSERVASI ALAM, SERTA PERLINDUNGAN SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG.
4. PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN: MELAKUKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA, AIR, DAN TANAH SERTA KERUSAKAN LINGKUNGAN LAINNYA, SERTA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN UNTUK MENGURANGI DAMPAK KERUSAKAN TERSEBUT.
3. SELAIN ITU, DLHK JUGA BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DARI PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN, SERTA MEMBANTU GUBERNUR SUMATERA UTARA DALAM MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI.

4. PENCAPAIAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP

PENCAPAIAN DALAM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI SUMATERA UTARA TERUS MENUNJUKKAN HASIL YANG POSITIF. BEBERAPA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) MENUNJUKKAN PERKEMBANGAN YANG BAIK, SEPERTI:

- INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN (IKL) YANG MENUNJUKKAN PENINGKATAN KUALITAS DARI TAHUN KE TAHUN. PADA TAHUN 2024, IKL BERADA DI ANGKA 73,96, DAN DIPERKIRAKAN AKAN MENINGKAT MENJADI 77,87 PADA TAHUN 2030. HAL INI MENUNJUKKAN UPAYA YANG KONSISTEN DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.
- INDEKS KUALITAS UDARA YANG TERUS MEMBAIK, MENUNJUKKAN KEBERHASILAN DALAM PENGENDALIAN POLUSI UDARA DAN PENCEMARAN YANG DISEBABKAN OLEH BERBAGAI FAKTOR INDUSTRI DAN KENDARAAN.
- PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN YANG SEMAKIN BAIK, DENGAN BERKURANGNYA TINGKAT KERUSAKAN KAWASAN HUTAN. SALAH SATU PENCAPAIAN YANG SIGNIFIKAN ADALAH PENURUNAN KERUSAKAN KAWASAN HUTAN YANG DICAPAI BERKAT PROGRAM REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL YANG TERUS DIGALAKKAN.

5. VISI DAN MISI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

VISI DLHK PROVINSI SUMATERA UTARA SEJALAN DENGAN VISI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA, YAITU:

- "KOLABORASI SUMUT BERKAH MENUJU SUMATERA UTARA YANG UNGGUL, MAJU, DAN BERKELANJUTAN."

MISI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MENCAKUP:

1. MENGEMBANGKAN DAN MENATA INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS, ESTETIK, SERTA RAMAH LINGKUNGAN, YANG BERFOKUS PADA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.
2. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN, DENGAN PENEKANAN PADA PEMULIHAN EKOSISTEM HUTAN DAN PENGURANGAN KERUSAKAN ALAM.
3. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BIJAK DAN BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA ALAM, DENGAN MEMPRIORITASKAN UPAYA

PENGURANGAN EMISI GAS RUMAH KACA SERTA MELINDUNGI KAWASAN KONSERVASI DAN EKOSISTEM ALAMI.

6. PROGRAM PRIORITAS DAN INTERVENSI

DLHK PROVINSI SUMATERA UTARA JUGA TERLIBAT DALAM BEBERAPA PROGRAM PRIORITAS YANG MENJADI BAGIAN DARI PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (PHTC) DAN PROGRAM STRATEGIS PROVINSI (PSP). PROGRAM INI BERTUJUAN UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN VISI DAN MISI PROVINSI, DENGAN FOKUS PADA:

1. CARBON TRADING DAN RESTORASI HUTAN

PROGRAM INI BERTUJUAN UNTUK MENGURANGI EMISI GAS RUMAH KACA MELALUI PENGELOLAAN KARBON YANG EFISIEN DAN MENDUKUNG RESTORASI HUTAN DI KAWASAN YANG TELAH RUSAK. TARGETNYA ADALAH UNTUK MENGURANGI EMISI KARBON MELALUI PROYEK-PROYEK RESTORASI YANG BERKELANJUTAN.

2. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LIMBAH BERBAHAYA

FOKUS PADA PENGELOLAAN LIMBAH PADAT, TERUTAMA SAMPAH PLASTIK, SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) YANG DAPAT MERUSAK LINGKUNGAN. UPAYA INI MENCAKUP PENINGKATAN KAPASITAS DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH SECARA LEBIH EFEKTIF DAN RAMAH LINGKUNGAN.

3. PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

MELALUI PENGELOLAAN DAS YANG TERINTEGRASI, DLHK BERUSAHA MENJAGA KELESTARIAN ALIRAN SUNGAI, MENGHINDARI KERUSAKAN AKIBAT EROSI, DAN MENINGKATKAN KEBERLANJUTAN EKOSISTEM DI SEPANJANG ALIRAN SUNGAI.

4. KONSERVASI ALAM

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA MENJADI FOKUS UTAMA, TERMASUK UPAYA UNTUK MELINDUNGI SPESIES LANGKA DAN HABITAT ALAMI MEREKA. PROGRAM INI JUGA MENCAKUP PEMBENTUKAN KAWASAN KONSERVASI BARU DI SUMATERA UTARA.

7. STRATEGI PELAKSANAAN DAN KOLABORASI STAKEHOLDER
PENCAPAIAN TUJUAN-TUJUAN TERSEBUT MEMERLUKAN KOLABORASI YANG ERAT ANTARA PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, SERTA STAKEHOLDER LAINNYA SEPERTI MASYARAKAT LOKAL DAN SEKTOR SWASTA. BEBERAPA STRATEGI PELAKSANAAN YANG DIUSULKAN DALAM RENCANA INI ADALAH:
 1. PENINGKATAN KOLABORASI DAN KETERLIBATAN STAKEHOLDER KERJA SAMA ANTARA BERBAGAI PIHAK SANGAT PENTING UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS DAN PENGETAHUAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. SELAIN ITU, KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN JUGA DIANGGAP VITAL UNTUK KEBERHASILAN PROGRAM INI.
 2. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INOVASI
MENERAPKAN TEKNOLOGI YANG RAMAH LINGKUNGAN DAN INOVASI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAPAT MEMPERCEPAT PENCAPAIAN TUJUAN TERSEBUT, SEPERTI PENGGUNAAN TEKNOLOGI UNTUK PENGELOLAAN KARBON DAN RESTORASI HUTAN.
8. TARGET DAN INDIKATOR KINERJA
UNTUK MENGUKUR KEMAJUAN PROGRAM-PROGRAM INI, DLHK MENETAPKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) YANG TERUKUR, SEPERTI PENINGKATAN LUAS KAWASAN HUTAN YANG DIKELOLA SECARA BERKELANJUTAN, PENGURANGAN EMISI GAS RUMAH KACA, SERTA PENINGKATAN KUALITAS EKOSISTEM HUTAN. SEMUA PROGRAM INI AKAN MEMILIKI TARGET YANG JELAS HINGGA TAHUN 2029, DENGAN PERHATIAN KHUSUS PADA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG LEBIH EFISIEN DAN BERKELANJUTAN

E. KESIMPULAN RAPAT

1. BERDASARKAN BAHAN PAPARAN YANG DISAMPAIKAN PADA RAPAT BAPEMPERDA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) PROVINSI SUMATERA UTARA MEMBERIKAN DUKUNGAN YANG SIGNIFIKAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2029.
2. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN YANG DIUSUNG OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH MENCAKUP PENGUATAN INFRASTRUKTUR, PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PENGEMBANGAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN. DINAS PUPR MEMILIKI PERAN PENTING DALAM MENCAPAI SASARAN TERSEBUT MELALUI BERBAGAI PROGRAM STRATEGIS, TERUTAMA DI BIDANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR SEPERTI JALAN, JEMBATAN, WADUK, DAN SISTEM IRIGASI.
3. DENGAN FOKUS PADA KEMANTAPAN JALAN, PENINGKATAN KAPASITAS IRIGASI, DAN PENATAAN RUANG YANG MENDUKUNG INVESTASI, PUPR DIHARAPKAN DAPAT MEMAJUKAN PROVINSI INI SECARA SIGNIFIKAN. BERBAGAI PROYEK INFRASTRUKTUR YANG DIRENCANAKAN, SEPERTI PENATAAN SUNGAI, PENINGKATAN KUALITAS KONSTRUKSI, DAN PENGELOLAAN AIR MINUM, AKAN MEMBERIKAN DAMPAK POSITIF YANG LUAS TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN KEMAJUAN PEREKONOMIAN DAERAH.
4. ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MASING-MASING SUB-URUSAN SANGAT MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET-TARGET MAKRO, YANG MENCAKUP KEMANTAPAN JALAN DAN JEMBATAN, PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, DAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG MERATA. SEMUA INISIATIF INI BERTUJUAN UNTUK MENCiptakan INFRASTRUKTUR YANG RAMAH LINGKUNGAN, BERKELANJUTAN, DAN BERNILAI TAMBAH BAGI MASYARAKAT.
5. DENGAN KOMITMEN YANG KUAT DARI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DAN PENGALOKASIAN SUMBER DAYA YANG TEPAT, RPJMD INI

DIHARAPKAN DAPAT MEWUJUDKAN PROVINSI SUMATERA UTARA YANG LEBIH MAJU, UNGGUL, DAN BERKELANJUTAN PADA AKHIR PERIODE 2029.

6. SECARA KESELURUHAN, RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA 2025-2029 BERFOKUS PADA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN, DENGAN MEMPERHATIKAN PENTINGNYA PERLINDUNGAN HUTAN, PENGELOLAAN DAS, DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN. PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS YANG TERCANTUM DALAM RENCANA INI AKAN SANGAT MENDUKUNG PENCAPAIAN VISI PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK MENJADI PROVINSI YANG UNGGUL, MAJU, DAN BERKELANJUTAN, SERTA BERPERAN AKTIF DALAM PENGURANGAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI PROGRAM CARBON TRADING DAN RESTORASI HUTAN.
7. RENCANA INI MENGEDEPANKAN KOLABORASI ANTARA PEMERINTAH, MASYARAKAT, DAN SEKTOR SWASTA DALAM MENGELOLA DAN MELESTARIKAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK KEPENTINGAN GENERASI MENDATANG, SERTA BERKOMITMEN UNTUK MENCiptakan SUMATERA UTARA YANG HIJAU DAN RAMAH LINGKUNGAN.

F. PENUTUP

DEMIKIAN RAPAT KERJA BAPEMPERDA DENGAN OPD INI DILAKSANAKAN, DAN RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 22.30 WIB OLEH PIMPINAN RAPAT BAPEMPERDA DPRD SUMATERA UTARA.

BAPEMPERDA
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
KETUA,



DARMA PUTRA RANGKUTI,S.Hut,M.Si